

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Strategi yang dilakukan oleh KPUD Jakarta Timur adalah strategi ofensif. Akan halnya strategi menembus pasar adalah sebuah strategi yang eksplorasi potensi kandidat yang telah ada agar mampu teroptimalisasikan secara maksimal. Strategi perluasan pasar diterapkan KPUD Jakarta Timur dengan bersinergi demokrasi relawan yang menysasar basis pemilih disabilitas untuk mengoptimalkan jangkauan. Selain itu, peran teknologi seperti media sosial juga berperan dalam mengoptimalkan jangkauan KPUD Jakarta Timur.

KPUD Jakarta Timur bergerak bersama relawan demokrasi masif dalam melakukan sosialisasi secara *door to door* pada setiap perkumpulan yang sedang dilakukan kelompok disabilitas. Sosialisasi politik adalah suatu proses dimana KPUD Jakarta Timur dapat memperkenalkan sistem politik atau pemilu kepada kelompok disabilitas, hal tersebut dapat membantu kelompok disabilitas menentukan sikap dan kesadarannya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dengan menggunakan hak pilihnya. Strategi ofensif atau masif menjadi diperlukan ketika tujuan yang ingin dicapai juga tinggi.

Mengenai aksesibilitas KPU Jakarta Timur masih perlu melakukan evaluasi dan perbaikan. Askes bagi kelompok disabilitas belum maksimal di TPS. Situasi di TPS di Jakarta Timur belum mampu mempersiapkan pendamping JBI (Juru Bahasa Isyarat) untuk membantu keberlangsungan pemberian hak suara kelompok disabilitas. Sehingga partisipasi kelompok disabilitas juga dipengaruhi oleh faktor keluarga, pilihan politik juga menyesuaikan dengan pilihan pihak keluarga. Kondisi TPS belum memudahkan dan ramah bagi disabilitas, lebar pintu untuk pengguna kursi roda masih belum optimal, tinggi kotak suara yang belum terjangkau, dan juga belum tersedia panita khusus untuk mendampingi kelompok disabilitas ketika memberikan hak suara di TPS.

Strategi sosialisasi yang dilakukan oleh relawan demokrasi secara keseluruhan merupakan bentuk mandat atau penugasan dari KPUD Jakarta Timur. Dalam

melakukan sosialisasi kepada kelompok disabilitas, relawan demokrasi tidak pernah melakukan sebuah pertemuan yang dibentuk dalam sebuah acara sosialisasi resmi dengan kelompok disabilitas. Melainkan dilakukan secara masif dan menyebar.

Pelaksanaan peran yang dilaksanakan oleh KPUD Jakarta Timur memang masih bersifat mendasar pada tahap hanya memenuhi standar teknis saja tanpa ada inovasi khusus. Namun upaya mendasar tersebut cukup memberi hasil yang memuaskan apabila dilihat dari tingginya angka presentasi partisipasi pemilih disabilitas di Wilayah Jakarta Timur pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Hal tersebut telah menandakan banyak masyarakat pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya, hal ini tidak terlepas dari peran KPUD Jakarta Timur sebagai penyelenggara pemilu. Pada pelaksanaannya KPUD Jakarta Timur menajalankan tugas dengan baik dan tersistematis sehingga proses pelaksanaan bisa berjalan optimal mulai dari upaya KPUD Jakarta Timur melakukan proses awal yang sangat baik, yaitu pemutakhiran data kelompok disabilitas, hingga dapat mewujudkan sebuah kesetaraan demokrasi berkualitas bagi pemilih disabilitas di Jakarta Timur.

## **V.2 Saran**

### **V.2.1 Saran Praktis**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, terdapat saran praktis pada strategi yang utama, yaitu:

1. KPUD perlu berupaya untuk menyediakan data faktual yang rinci terkait pemilih tetap kelompok disabilitas. Data faktual yang rinci, terkait dengan bagaimana penyandang disabilitas yang beragam rupa,
2. KPUD perlu merancang *treatment* atau pelayanan khusus berdasarkan kondisi yang dialami oleh kelompok difabel.
3. KPUD perlu merancang instrumen kondisi TPS sesuai dengan kondisi penyandang disabilitas, tidak hanya terfokus pada penyandang disabilitas secara fisik saja, belum mencakup jenis disabilitas yang lain.

### **V.2.2 Saran Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu acuan referensi akademik untuk melihat bagaimana peran KPUD secara umum untuk melaksanakan perannya untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas.
2. Perlu menjadi penelitian berkelanjutan dengan melakukan perbandingan upaya yang dilakukan oleh KPUD Jakarta Timur pada tahun Pilkada yang diteliti dengan tahun sebelumnya sebagai bahan perbandingan. Peneliti selanjutnya juga dapat melakukan penelitian dengan melihat dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).